

DAFTAR PUSTAKA

- Aran, K. S. (2022). Efektivitas pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik Dan Akuntabilitas*, 8(2), 101–115.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). Pedoman penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Dwipayana, A., & Wijaya, A. (2021). *Good Governancedalam* pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 12(1), 45–59.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Jurnal Humanika*, 21(1), 33–54.
- Fadzillah, N. A., & Arifa, C. (2022). Analisis peran inspektorat daerah dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 17(2), 145–158.
- Indonesia, P. R. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Kapantow, R., Rompas, W., & Kolondam, H. (2024). Efektivitas pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Akuntabilitas Publik*, 9(1), 55–69.
- Kaur, P. K. (2023). *Peraturan Bupati Kaur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Inspektorat Kabupaten Kaur*.
- Kusuma, D., & Hermawan, R. (2021). Implementasi sistem pengendalian internal pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 16(1), 33–47.
- Misno. (2021). Konsep dan pengembangan kerangka konseptual dalam penelitian. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 5(1), 1–10.
- Mulyani, S., & Dewi, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Keuangan Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 88–102.
- Nugrahani, F. (2020). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Cakra Books.
- Polidu, A., Kalangi, L., & Tinangon, J. (2020). Risiko penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dan peran pengawasan internal. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 11(3), 201–213.

- Rahayu, S., & Siregar, M. (2020). Pengawasan pengelolaan dana desa berbasis evaluasi kinerja. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 11(2), 120–134.
- Saputra, R., & Wijaya, A. (2021). Sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Pemerintahan*, 15(1), 1–14.
- Sari, R., & Halim, A. (2021). Penguatan peran APIP dalam meningkatkan kualitas pengawasan keuangan daerah. *Jurnal Pengawasan Dan Tata Kelola Publik*, 10(2), 90–105.
- Setyaningrum, D., & Mardiasmo. (2020). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 17(1), 1–15.
- Tumboimbela, G., Gosal, R., & Waworundeng, W. (2022). Pengawasan inspektorat dalam pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(3), 150–164.
- Wibowo, R., & Heryono, A. (2022). Pengaruh pengawasan internal terhadap pencegahan penyimpangan dana desa. *Jurnal Akuntansi Dan Tata Kelola Publik*, 13(2), 67–80.
- Wicaksana, D., & Suyanto. (2021). Teori dan praktik pengawasan dalam pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 25–39.

L

A

M

P

I

R

A

N



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DENGAN JUDUL

PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAUR DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANG DESA JAWI, TALANG PADANG DAN GUNUNG MEGANG

Perkenalkan

Nama : MELSI FEBRIANTI

PRODI : AKUNTANSI

UNIV : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Yth. Bapak/Ibu

Dalam rangka penelitian saya untuk mengkaji bagaimana peran Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa Jawi, Talang Padang dan Gunung Megang, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk bersedia di wawancarai. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan akan sangat membantu dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ini. kerahasiaan identitas dan jawaban Bapak/Ibu akan terjamin.

Atas partisipasi dan waktu yang telah diluangkan, saya mengucapkan terimakasih.

Bengkulu, Juli 2026

Peneliti



Melsi Febrianti

NPM : 2462201078P

Pedoman Wawancara

No	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan Wawancara	Subjek Penelitian	Sumber
1	Perencanaan	Pengawasan penyusunan RKP Desa	Bagaimana peran Inspektorat dalam mengawasi penyusunan RKP Desa?	IRBAN, Auditor/PPUPD, Kepala Desa	Polidu et al. (2020); Fadzillah & Arifa (2022)
		Pengawasan penyusunan APBDes	Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penyusunan APBDes sebelum ditetapkan?	IRBAN, Auditor/PPUPD, Kaur Keuangan	Polidu et al. (2020); Kapantow et al. (2024)
		Review dokumen perencanaan	Apakah Inspektorat melakukan review terhadap dokumen perencanaan desa? Bagaimana pelaksanaannya?	IRBAN, Auditor/PPUPD	Fadzillah & Arifa (2022)
		Pembinaan pada tahap perencanaan	Apakah terdapat pembinaan atau asistensi kepada pemerintah desa sebelum APBDes ditetapkan?	IRBAN, Kepala Desa	Sari & Halim (2021); Fadzillah & Arifa (2022)
		Pencegahan penyimpangan	Bagaimana upaya Inspektorat mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan?	IRBAN, Auditor/PPUPD	Kapantow et al. (2024)
2	Pelaksanaan	Audit pelaksanaan kegiatan	Bagaimana pelaksanaan audit terhadap kegiatan yang dibiayai Dana Desa?	IRBAN, Auditor	Polidu et al. (2020); Kapantow et al. (2024)
		Monitoring kegiatan	Bagaimana monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan	IRBAN, Auditor/PPUPD, Kepala Desa	Polidu et al. (2020); Tumboimbel a et al. (2022)

			pembangunan desa?		
		Evaluasi pelaksanaan	Bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan APBDes dilakukan?	IRBAN, Auditor/PPUPD	Kapantow et al. (2024)
		Kesesuaian pelaksanaan dengan APBDes	Bagaimana memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan APBDes?	Kepala Desa, Kaur Keuangan	Putri & Rahman (2022); Mulyani & Dewi (2021)
		Kendala pengawasan	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan desa?	IRBAN, Auditor/PPUPD	Kapantow et al. (2024); Polidu et al. (2020)
3	Penatausahaan	Pencatatan transaksi	Bagaimana pengawasan terhadap pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa?	Auditor/PPUPD, Kaur Keuangan	Fadzillah & Arifa (2022); Mulyani & Dewi (2021)
		Pemeriksaan administrasi	Bagaimana pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pajak dilakukan?	Auditor/PPUPD, Kaur Keuangan	Kapantow et al. (2024); Fadzillah & Arifa (2022)
		Penggunaan Siskeudes	Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes?	Auditor, Kaur Keuangan	Saputra & Wijaya (2021)
		Ketepatan pencatatan	Bagaimana memastikan seluruh transaksi dicatat secara lengkap dan benar?	Auditor, Kaur Keuangan	Saputra & Wijaya (2021); Mulyani & Dewi (2021)
		Kendala administrasi	Kesalahan administrasi apa	Auditor/PPUPD, Kaur Keuangan	Fadzillah & Arifa (2022)

			yang paling sering ditemukan?		
4	Pertanggung jawaban	Pemeriksaan laporan	Bagaimana pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban APBDes dilakukan?	IRBAN, Auditor/P2UPD	Kapantow et al. (2024); Polidu et al. (2020)
		Kelengkapan dokumen	Dokumen apa saja yang menjadi fokus pemeriksaan Inspektorat?	Auditor/PPUPD	Kapantow et al. (2024)
		Rekomendasi hasil pemeriksaan	Bagaimana rekomendasi hasil pemeriksaan diberikan kepada pemerintah desa?	IRBAN, Auditor/PPUPD	Polidu et al. (2020)
		Tindak lanjut rekomendasi	Bagaimana pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan?	IRBAN, Auditor/PPUPD, Kepala Desa	Kapantow et al. (2024)
		Akuntabilitas	Bagaimana pengawasan Inspektorat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?	IRBAN, Kepala Desa	Mulyani & Dewi (2021); Putri & Rahman (2022)
5	Pengelolaan Aset Desa	Inventarisasi aset	Bagaimana pengawasan terhadap inventarisasi aset desa dilakukan?	Auditor/PPUPD, Kepala Desa	Saputra & Wijaya (2021); Mulyani & Dewi (2021)
		Pengamanan aset	Bagaimana memastikan aset desa telah diamankan dengan baik?	Auditor/PPUPD, Kepala Desa	Saputra & Wijaya (2021)
		Pemanfaatan aset	Bagaimana pengawasan terhadap pemanfaatan aset desa?	Kepala Desa, Kaur Keuangan	Putri & Rahman (2022)

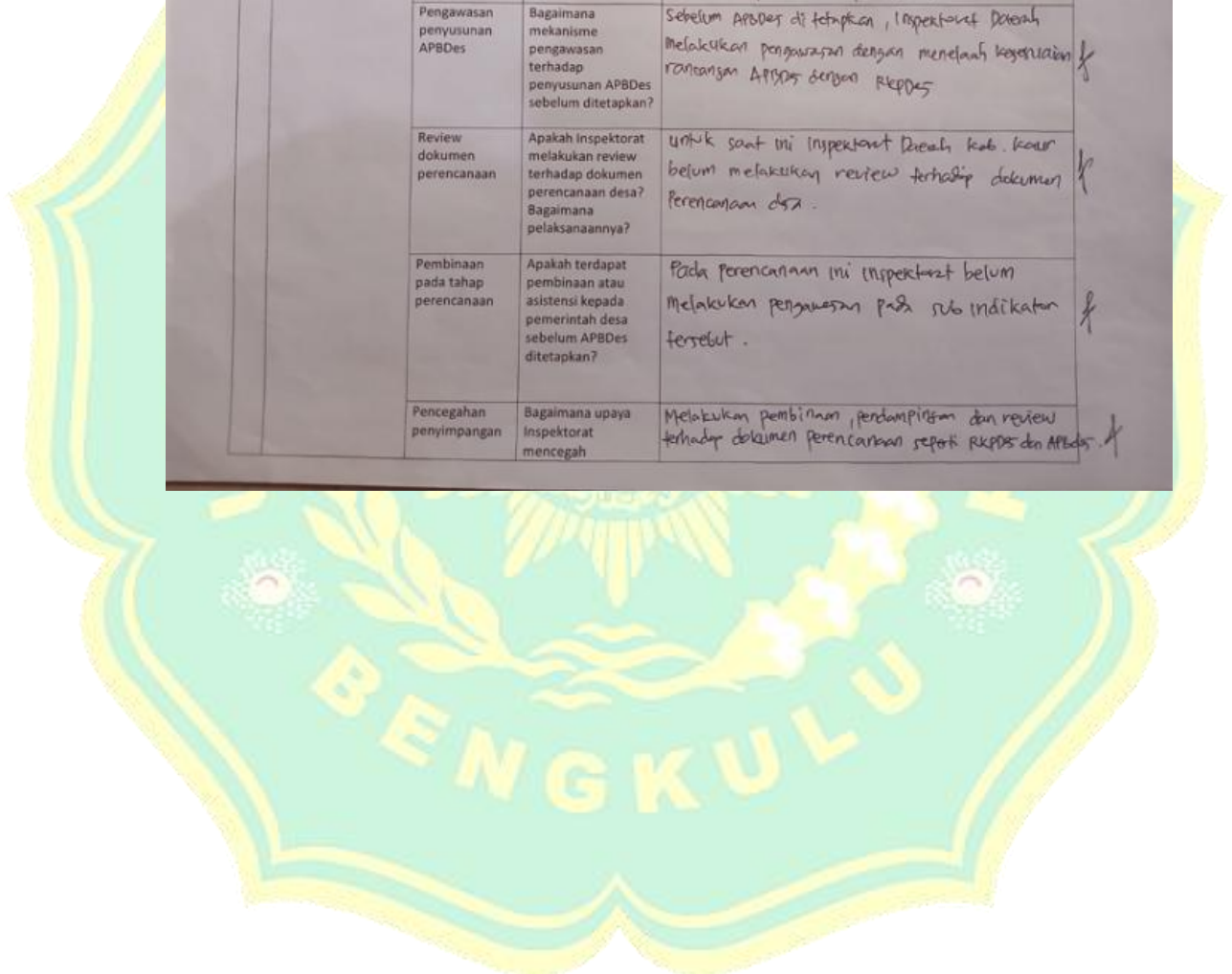
		Pemeriksaan fisik aset	Apakah dilakukan pemeriksaan fisik aset desa secara berkala?	Auditor/PPUPD	Kapantow et al. (2024)
		Penyelesaian temuan aset	Bagaimana tindakan Inspektorat apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan aset desa?	IRBAN, Auditor/PPUPD	Aran (2022); Wibowo & Heryono (2022)
6	Upaya Peningkatan Pengawasan	Pembinaan	Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan kepada pemerintah desa?	IRBAN, Kepala Desa	Fadzillah & Arifa (2022); Sari & Halim (2021)
		Pendampingan	Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan kepada pemerintah desa?	IRBAN, Auditor/PPUPD	Sari & Halim (2021)
		Koordinasi	Bagaimana koordinasi antara Inspektorat, DPMD, dan Kecamatan dalam pengawasan desa?	IRBAN	Tumboimbel a et al. (2022)
		Penerapan SPIP	Bagaimana penerapan SPIP dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa?	IRBAN, Auditor/PPUPD	Saputra & Wijaya (2021); BPKP (2021)
		Pencegahan penyimpangan	Strategi apa yang dilakukan untuk mencegah penyimpangan pengelolaan Dana Desa?	IRBAN, Auditor/PPUPD	Wibowo & Heryono (2022); Aran (2022)

HASIL WAWANCARA

IRBAN I

Nama : APRIZAL, S.E
Jabatan : IRBAN

No	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Perencanaan	Pengawasan penyusunan RKP Desa	Bagaimana peran Inspektorat dalam mengawasi penyusunan RKP Desa?	Memastikan proses penyusunannya sesuai Peraturan dengan melibatkan musyawarah desa. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Inspektorat memberikan pembinaan perbaikan.
		Pengawasan penyusunan APBDes	Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penyusunan APBDes sebelum ditetapkan?	Sebelum APBDes ditetapkan, Inspektorat Daerah melakukan pengawasan dengan menelaah kelayakan rancangan APBDes dengan RKPDs.
		Review dokumen perencanaan	Apakah Inspektorat melakukan review terhadap dokumen perencanaan desa? Bagaimana pelaksanaannya?	Untuk saat ini Inspektorat Daerah kab. Kobar belum melakukan review terhadap dokumen perencanaan desa.
		Pembinaan pada tahap perencanaan	Apakah terdapat pembinaan atau asistensi kepada pemerintah desa sebelum APBDes ditetapkan?	Pada perencanaan ini Inspektorat belum melakukan pengawasan pada sub indikator tersebut.
		Pencegahan penyimpangan	Bagaimana upaya Inspektorat mencegah	Melakukan pembinaan, pendampingan dan review terhadap dokumen perencanaan seperti RKPDs dan APBDes.



		APBDes dilakukan?	Inspektur memberikan rekomendasi perbaikan yang harus diindaklanjuti oleh pemerintah desa.
	Rekomendasi hasil pemeriksaan	Bagaimana rekomendasi hasil pemeriksaan diberikan kepada pemerintah desa?	Inspektur Daerah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan secara tertulis dalam bentuk LHP yang berisi temuan serta tindakan perbaikan yang harus dilakukan pemerintah desa. selanjutnya inspektur memantau tindak lanjut dari rekomendasi tersebut.
	Tindak lanjut rekomendasi	Bagaimana pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan?	Dengan memverifikasi bukti pelaksanaan yang disampaikan oleh pemerintah desa melalui pemeriksaan dokumen dan bila perlu pemeriksaan lapangan. jika rekomendasi belum dilaksanakan, inspektur meminta pemerintah desa untuk melanjutkan hingga seluruh temuan dimuntakan.
	Akuntabilitas	Bagaimana pengawasan Inspektorat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?	Dengan melaksanakan audit, monev dan pembinaan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan.
4	Pengelolaan Aset Desa	Penyelesaian temuan aset	Penyimpangan tersebut di terbitkan dalam LHP yang memuat temuan dan rekomendasi, laporan pertanggung jawaban administrasi aset, pengembalian aset atau kerugian daerah, serta perbaikan pengelolaan aset.
5	Upaya Peningkatan Pengawasan	Pembinaan	Membenarkan pembinaan melalui sosialisasi/pengaturan regulasi, pendampingan dan konsultasi mengenai pengelolaan keuangan desa. pembinaan ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur desa agar pengelolaan keuangan dan aset desa dilaksanakan sesuai ketentuan.

			penyimpangan sejak tahap perencanaan?	
2	Pelaksanaan	Audit pelaksanaan kegiatan	Bagaimana pelaksanaan audit terhadap kegiatan yang dibiayai Dana Desa?	Audit dilakukan oleh inspektorat desa melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan untuk menilai keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, penggunaan anggaran, serta hasil kegiatan.
		Monitoring kegiatan	Bagaimana monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa?	Monitoring dengan pemantauan langsung ke lokasi dan pemeriksaan dokumen pelaksanaan kegiatan untuk memastikan pekerjaan/kegiatan berjalan sesuai rencana, jadwal, anggaran, dan ketentuan yang berlaku.
		Evaluasi pelaksanaan	Bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan APBDes dilakukan?	Evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dengan APBDes yang telah ditetapkan, tujuannya untuk menilai pencapaian pelaksanaan, evaluasi penggunaan anggaran serta mengidentifikasi penyimpangan untuk diberikan perlakuan.
		Kendala pengawasan	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan desa?	Keterbatasan jumlah auditor, kurangnya pelatihan pengawasan, keterbatasan waktu dan anggaran, rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi, serta keterlambatan penyampaian dokumen yang diperlukan dalam proses pengawasan.
3	Pertanggungjawaban	Pemeriksaan laporan	Bagaimana pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban	Dengan mencocokkan laporan realisasi APBDes, bukti pengeluaran / SPJ, dokumen pendukung dan hasil kegiatan. Jika ditemukan ketidaksesuaian

	Pendampingan	Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan kepada pemerintah desa?	Melalui konsultasi, asistensi dan pemberian arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
	Koordinasi	Bagaimana koordinasi antara Inspektorat, OPMD, dan Kecamatan dalam pengawasan desa?	Melalui sharing/pertukaran informasi, rapat koordinasi serta pembagian tugas sesuai kewenangan masing-masing dalam pembinaan dan pengawasan desa.
✓	Penerapan SPIP	Bagaimana penerapan SPIP dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa?	Dengan menilai efektivitas pengendalian intern pada tiap tahapan pengelolaan desa, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Melalui penerapan SPIP, Inspektorat memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan tertib, baik terhadap pelaporan, serta mampu mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan.
	Pencegahan penyimpangan	Strategi apa yang dilakukan untuk mencegah penyimpangan pengelolaan Dana Desa?	Melakukan pembinaan, sosialisasi regulasi, pendampingan, monitoring, audit berbasis risiko, serta evaluasi secara berkala. Selain itu Inspektorat memberikan rekomendasi perbaikan dan memantau tindak lanjutnya guna memastikan pengelolaan desa berlangsung secara transparan, akuntabel dan sesuai peraturan yang berlaku.

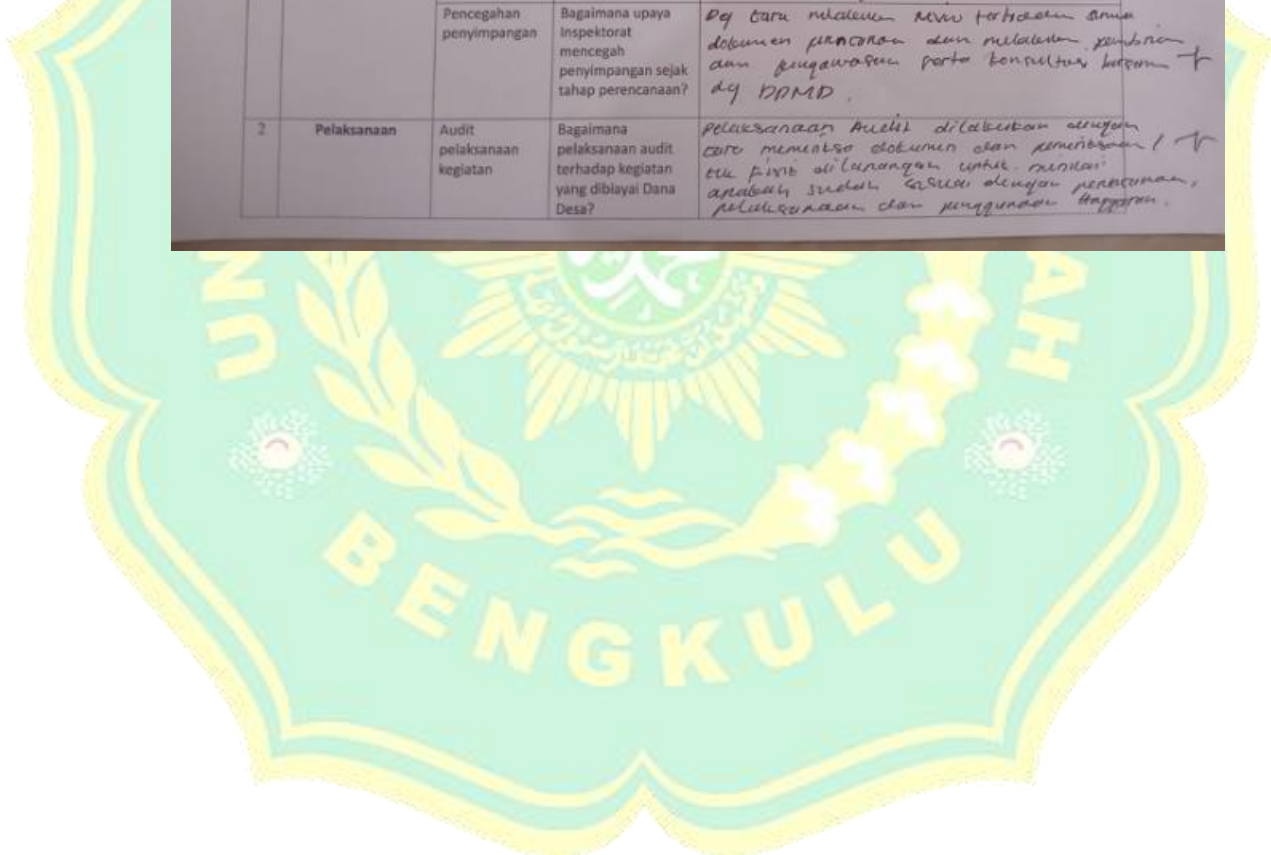
Subjek Penelitian: IRBAN



AUDITOR

Nama : Khotijah S.S.S, MM
Jabatan : Auditor Muda

No	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Perencanaan	Pengawasan penyusunan RKP Desa	Bagaimana peran Inspektorat dalam mengawasi penyusunan RKP Desa?	melalui berbagai dokumen RKP, dan program prioritas nasional, daerah, dan kemampuan keuangan desa.
		Pengawasan penyusunan APBDes	Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penyusunan APBDes sebelum ditetapkan?	melakukan review penyusunan APBDes apakah sudah sesuai dengan standar yg berlaku dan sesuai dg hasil musyawarah permusyawaratan penggunaan untuk masing-masing? Ya/ Tidak/ Benar/ Salah.
		Review dokumen perencanaan	Apakah Inspektorat melakukan review terhadap dokumen perencanaan desa? Bagaimana pelaksanaannya?	melakukan review terhadap dokumen perencanaan desa, RKPDes dan APBDes. dilakukan sebelum penyetoran RKPDes ke Bappeda dan Bappeda.
		Pencegahan penyimpangan	Bagaimana upaya Inspektorat mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan?	Dg cara melakukan review terhadap semua dokumen perencanaan dan melakukan pembinaan dan pengawasan serta konsultasi dengan Bappeda.
2	Pelaksanaan	Audit pelaksanaan kegiatan	Bagaimana pelaksanaan audit terhadap kegiatan yang dibayai Dana Desa?	Pelaksanaan Audit dilakukan dengan cara memeriksa dokumen dan pemeriksaan / tes fisik di lapangan untuk melihat apakah sudah sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan anggaran.



		Monitoring kegiatan	Bagaimana monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa?	Monitoring dilakukan 1 tahun sekali berdasarkan PKAT 2026.	+
		Evaluasi pelaksanaan	Bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan APBDes dilakukan?	Belum pernah melakukan evaluasi terhadap APBDes.	+
		Kendala pengawasan	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan desa?	Luasnya wilayah pengawasan dan ketersediaan anggaran serta sarana dan prasarana transportasi	+
3	Penatausahaan	Pencatatan transaksi	Bagaimana pengawasan terhadap pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa?	Melakukan audit, Revisi dan evaluasi terkait terhadap pengelolaan keuangan dan cost desa.	+
		Pemeriksaan administrasi	Bagaimana pemeriksaan terhadap Buku Kas	Melakukan Audit, Revisi dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan aset desa.	+

			Umum, Buku Bank, dan Buku Pajak dilakukan?		
		Penggunaan Siskeudes	Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes?	Untuk saat ini masih menggunakan pengawasan secara manual (belum menggunakan aplikasi pendulum / Siskeudes)	+
		Ketepatan pencatatan	Bagaimana memastikan seluruh transaksi dicatat secara lengkap dan benar?	Mengikuti pembukuan dengan pengeluaran.	+
		Kendala administrasi	Kesalahan administrasi apa yang paling sering ditemukan?	Terlambatan penarikan dokumen dan pembuatan laporan pertanggungjawaban pengeluaran	+
4	Pertanggungjawaban	Pemeriksaan laporan	Bagaimana pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban APBDes dilakukan?	Bukti pengeluaran di cocokkan dengan APBDes dan RAB	+
		Kelengkapan dokumen	Dokumen apa saja yang menjadi fokus pemeriksaan Inspektorat?	mulai dari dokumen musdes, APBDes, APBDes RAB, BUKU, Buku penitensi Bank, Buku penitensi pajak, Rekening Bank, SPJ dan laporan akhir bulan desa.	+

		Rekomendasi hasil pemeriksaan	Bagaimana rekomendasi hasil pemeriksaan diberikan kepada pemerintah desa?	melalui LRA (Caporn langsung + Auct).
		Tindak lanjut rekomendasi	Bagaimana pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan?	dalam pemantauan TL diberikan waktu selama 60 hari setelah LRA diberikan + dan untuk mengetahui apakah TL yang sudah dilaksanakan dibuat notifikasi. Untuk TL sampai temuan tersebut mengungkap status sesuai.
		Akuntabilitas	Bagaimana pengawasan Inspektorat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?	dengan melaksanakan pengawasan monitoring, Auct, dan pengawasan lainnya untuk memastikan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan yg berlaku.
5	Pengelolaan Aset Desa	Inventarisasi aset	Bagaimana pengawasan terhadap inventarisasi aset desa dilakukan?	dilakukan pengelompokan barang secara langsung terhadap barang 3 inventaris yg sudah dikali untuk memastikan barang tersebut ada.
		Pengamanan aset	Bagaimana memastikan aset desa telah diamankan dengan baik?	dilihat dan adanya kurang penyimpanan aset dan adanya pungutan/pengelolaan aset yg mungkin bisa merugikan aset tersebut dari gudang.



PPUPD

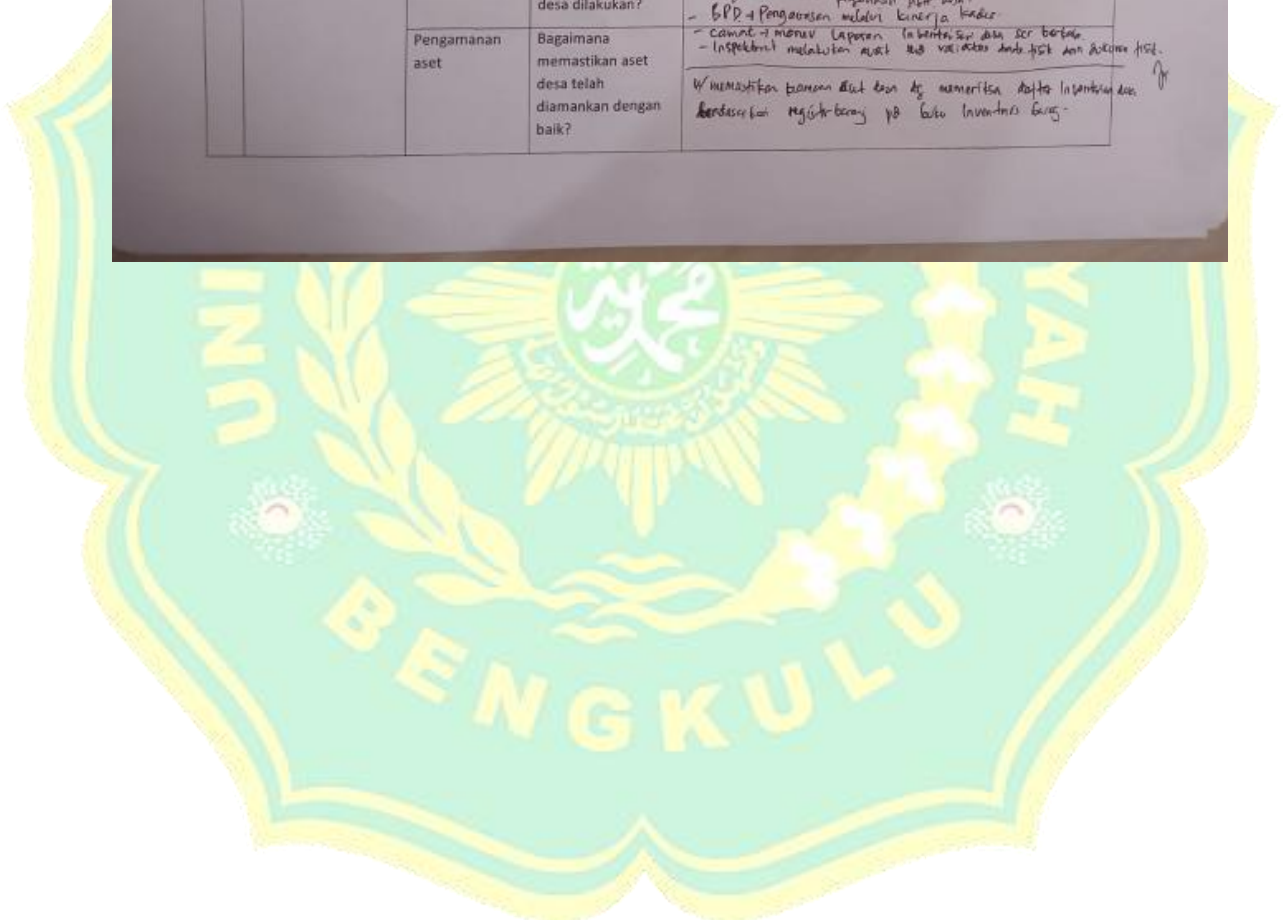
Nama : Agustina Sri Hartanti, SH
Jabatan : PPUPD Madya

No	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Perencanaan	Pengawasan penyusunan RKP Desa	Bagaimana peran Inspektorat dalam mengawasi penyusunan RKP Desa?	berikut pengawasan yg dilakukan dg meneliti dokumen RKP Desa dg program prioritas Nasional, daerah dan kemampuan Keuangan Desa. dg kata lain melakukan Review Perencanaan - memberikan pendampingan teknis (ktd) Desa, jika diperlukan lagi
		Pengawasan penyusunan APBDes	Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penyusunan APBDes sebelum ditetapkan?	Penyusunan Program dan Ttk melalui proses Perencanaan - APBDes - mengawasi Tahapan Perencanaan hingga tahap APBDes dg - melakukan monitoring dan evaluasi, - melakukan kaji ulang jika ada aksi masyarakat atau
		Review dokumen perencanaan	Apakah Inspektorat melakukan review terhadap dokumen perencanaan desa? Bagaimana pelaksanaannya?	Inspektorat melakukan review proses penyusunan APBDes Dg melakukan kaji ulang dokumen perencanaan desa - RKP Desa dan APBDes, dilakukan sebelum penetapan - menilai keabsahan dokumen perencanaan Bgk RPMDes.
		Pencegahan penyimpangan	Bagaimana upaya Inspektorat mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan?	① jika terdapat penyimpangan dalam perencanaan maka akan dilakukan pemeriksaan maka akan dilakukan saran dan rekomendasi / dilakukan perbaikan. ② dg mengedukasi fungsi pemantauan dan pengawasan di tingkat Desa - Memastikan sistem, memastikan Sinergi dan Kerjasama PMPD
2	Pelaksanaan	Audit pelaksanaan kegiatan	Bagaimana pelaksanaan audit terhadap kegiatan yang dibiayai Dana Desa?	- memastikan Organe dan program prioritas penggunaan prioritas Dana Desa telah ada, terdapat dan terintegrasi dengan - melakukan pemantauan risiko korupsi dan Monev - meng

Atribut Alotmentnya dg:			
1. Persiapan: membuat PCD dan menetapkan data terpel. melalui PKPT.			
Monitoring kegiatan		→	1. Atribut Alotment: menentukan agenda, pengurusan dana dan lain-lain seperti yg telah. 2. Atribut Biaya: mengukur besarnya agenda apakah terpel. Pengurusan Dana. 3. Atribut Pelaksanaan: kegiatan, waktu, tempat. 4. Pembentukan LKPP yg lebih terencana, terencana, serta Pembentukan Monitoring di lakukan: 1x Blasanahen, 6x Blasanahen PKPT.
	Bagaimana monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa?		
	Evaluasi pelaksanaan	Bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan APBDes dilakukan?	melalui Post audit / Pembinaan oleh tim pengawasan.
Kendala pengawasan	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan desa?		- Lupa atau lupa pengawasan dan keterbatasan anggaran - Penemuan dokumen pengantar
3 Penatausahaan	Pencatatan transaksi	Bagaimana pengawasan terhadap pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa?	- Pengisian dokumen, cek rekening koran - Pengisian buku-buku penerimaan, pengeluaran, rekening SP - Verifikasi akhir: memeriksa pengisian di akhir of pelaksanaan kegiatan dan verifikasi di akhir dan di akhir kegiatan. - Di kemahalaan hanya yg mubandahen 100% + 40% + 40% + 50% - Di akhir mubandahen 100% + 40% + 40% + 50%
	Pemeriksaan administrasi	Bagaimana pemeriksaan terhadap Buku Kas	melakukan pengawasan

		Umum, Buku Bank, dan Buku Pajak dilakukan?	
	Penggunaan Siskeudes	Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes?	Inspektat hanya melakukan Pengoran ser manual. tidak melalui aplikasi hanya memastikan bahwa desu be telah menggunakan aplikasi siskeudes
	Ketepatan pencatatan	Bagaimana memastikan seluruh transaksi dicatat secara lengkap dan benar?	Melakukan pemeriksaan itu berdasarkan dokumen. Berdasarkan gambar.
	Kendala administrasi	Kesalahan administrasi apa yang paling sering ditemukan?	- kesalahan penulisan, salah memasukkan angka. - Pencatatan ganda, - Salah akun - menunda pencatatan hingga akhir bulan.
4	Pertanggungjawaban	Pemeriksaan laporan	Pemeriksaan Eksekutif GSK melalui Audit / pemeriksaan bntaoran, pemeriksaan kinerja dan MVO. - perencanaan audit + PERT. - Pelaksanaan & uji petik. - Penyusunan LHP dan Tindak lanjut.
	Kelengkapan dokumen	Dokumen apa saja yang menjadi fokus pemeriksaan Inspektorat?	- Perdis. - dokumen perencanaan, APBD, RAP & BKU. kelengkapan Pertanggungjawaban dan Panti Sisi Anggaran

		Rekomendasi hasil pemeriksaan	Bagaimana rekomendasi hasil pemeriksaan diberikan kepada pemerintah desa?	Melalui LHP yg diterbitkan.
		Tindak lanjut rekomendasi	Bagaimana pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan?	Melalui forum pemantauan yg telah diadakan lagi dan oleh orang yg telah ditugaskan dan melalui tindak lanjut sampai semua dinyatakan selesai.
		Akuntabilitas	Bagaimana pengawasan Inspektorat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?	Melakukan pengawasan secara rutin dan pemantauan yg diperlukan.
5	Pengelolaan Aset Desa	Inventarisasi aset	Bagaimana pengawasan terhadap inventarisasi aset desa dilakukan?	- Pengawasan dilakukan melalui dari kebijakan yg dikeluarkan oleh Kabid (St. Pengelola aset desa) Sbg pengawasan alam yg lebih tinggi dr pengelolaan aset desa dan rangka meningkatkan kerja pengelolaan aset desa. - BPD + Pengawasan melalui kinerja kader
		Pengamanan aset	Bagaimana memastikan aset desa telah diamankan dengan baik?	- Camat + menuv laporan inventarisasi dan serbata. - Inspektur melakukan audit dan verifikasi data aset dan dokumen aset. - Memastikan barang aset dan yg memiliki data inventarisasi dan berdasarkan register barang yg ada inventaris barang.



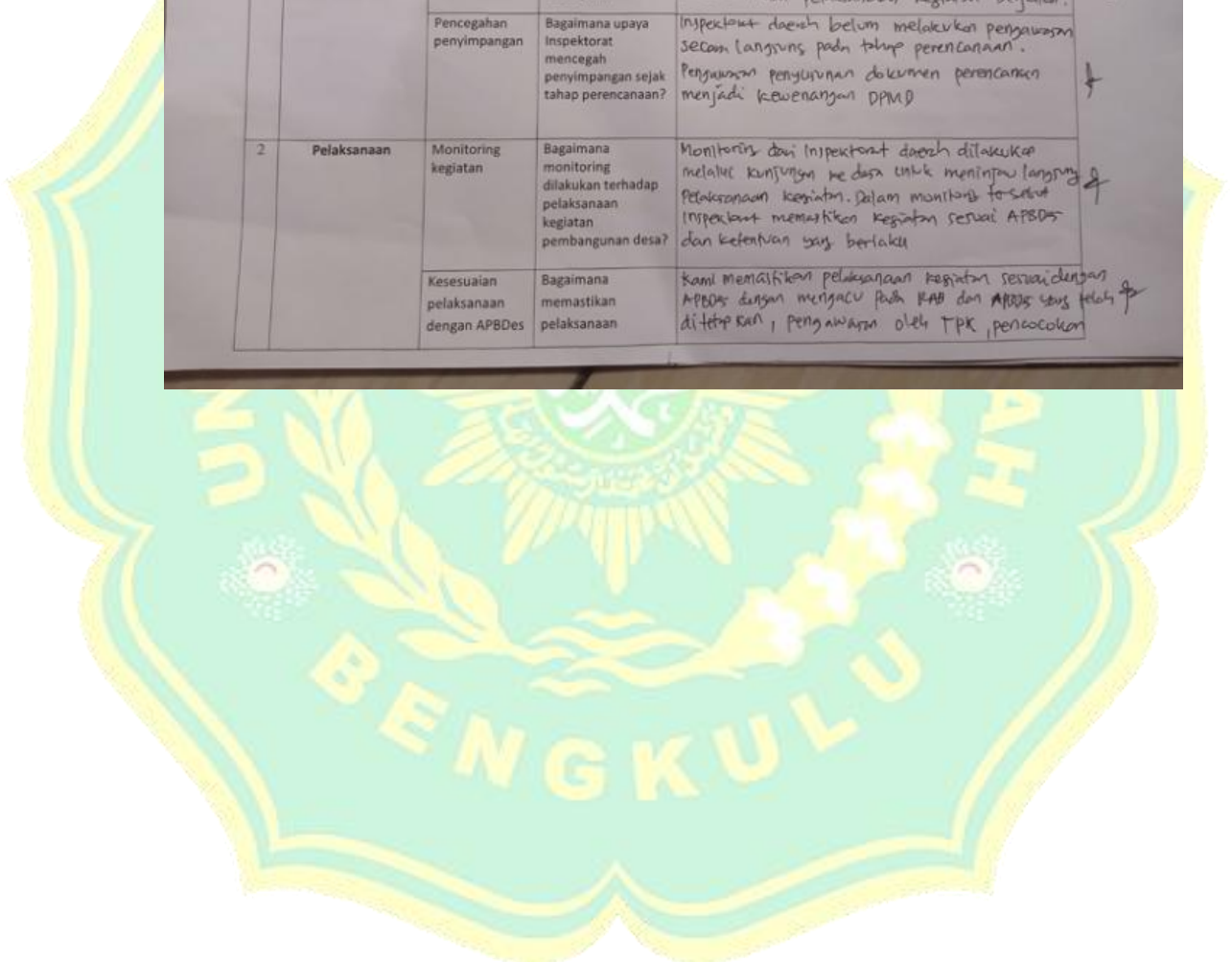
			Umum, Buku Bank, dan Buku Pajak dilakukan?	
		Penggunaan Siskeudes	Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes?	Inspektori hanya melakukan Pengawasan Ser manual. Tidak melalui Aplikasi hanya memastikan bahwa data ts telah menggunakan aplikon Siskeudes
		Ketepatan pencatatan	Bagaimana memastikan seluruh transaksi dicatat secara lengkap dan benar?	Melakukan pemeriksaan tsu kelabsahan Sistem. Pertanggungjawaban.
		Kendala administrasi	Kesalahan administrasi apa yang paling sering ditemukan?	- kesalahan penulisan, salah memasukkan angka. - Pencatatan ganda, - Salah akun - menunda Pencatatan hingga akhir bulan.
4	Pertanggungjawaban	Pemeriksaan laporan	Bagaimana pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban APBDes dilakukan?	Pemeriksaan Eksternal Gisa melalui Audit / pemeriksaan kutatan, pemeriksaan kinerja dan MNU. - perencanaan audit + PEPT. - Pelaksanaan & uji petik. - Penyusunan LHP dan Tindakan lanjut.
		Kelengkapan dokumen	Dokumen apa saja yang menjadi fokus pemeriksaan Inspektori?	- Perdis. - Dokumen perencanaan, APBDes, RAB & BKU. kelengkapan Pertanggungjawaban dan Realisasi Anggaran



Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Jawi

Nama : Yendra Haito
Jabatan : Kepala Desa Jawi

No	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Perencanaan	Pengawasan penyusunan RKP Desa	Bagaimana peran Inspektorat dalam mengawasi penyusunan RKP Desa?	Pada perencanaan pengawasan penyusunan RKPDes dan pembinaan pada tahap perencanaan, Inspektorat Daerah belum melakukan pengawasan secara langsung. Pengawasan pada tahap perencanaan
		Pembinaan pada tahap perencanaan	Apakah terdapat pembinaan atau asistensi kepada pemerintah desa sebelum APBDes ditetapkan?	181 lebih banyak dilakukan oleh PMD dan Pendaupda desa melalui evaluasi dan penzimpangan Penyusunan RKPDes. Peran Inspektorat baru terlihat pada tahap pemeriksaan/audit setelah dokumen dan pelaksanaan kegiatan berjalan.
		Pencegahan penyimpangan	Bagaimana upaya Inspektorat mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan?	Inspektorat daerah belum melakukan pengawasan secara langsung pada tahap perencanaan. Pengawasan penyusunan dokumen perencanaan menjadi kewenangan DPMD
2	Pelaksanaan	Monitoring kegiatan	Bagaimana monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa?	Monitoring dari Inspektorat daerah dilakukan melalui kunjungan ke desa untuk memantau langsung pelaksanaan kegiatan. Dalam monitoring tersebut Inspektorat memastikan kegiatan sesuai APBDes dan ketentuan yang berlaku
		Kesesuaian pelaksanaan dengan APBDes	Bagaimana memastikan pelaksanaan	Kami memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan APBDes dengan mengacu pada RAB dan APBDes yang telah ditetapkan, pengawasan oleh TPK, pencocokan



			kegiatan sesuai dengan APBDes?	bukti pengeluaran dan pemeriksaan oleh Inspektorat
3	Pertanggungjawaban	Tindak lanjut rekomendasi	Bagaimana pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan?	Setelah menerima LHP dari Inspektorat Daerah, kami segera menindaklanjuti setiap rekomendasi dengan melengkapi dokumen, memperbaiki administrasi atau menyelesaikan temuan sesuai yang diminta
		Akuntabilitas	Bagaimana pengawasan Inspektorat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?	Pengawasan dari Inspektorat Daerah mendorong kami untuk lebih tertib dalam mengelola keuangan desa. Melalui pemeriksaan kami menjadi lebih teliti dalam menyusun Laporan, melengkapi bukti pertanggungjawaban
4	Pengelolaan Aset Desa	Inventarisasi aset	Bagaimana pengawasan terhadap inventarisasi aset desa dilakukan?	Dilakukan dengan mencatat seluruh aset ke dalam buku Inventaris aset, melakukan pengecekan fisik secara berkala. Inspektorat kemudian memeriksa kesesuaian antara data inventaris, dokumen pendukung dan kondisi aset & lapangan saat melakukan pemeriksaan.
		Pengamanan aset	Bagaimana memastikan aset desa telah diamankan dengan baik?	Melakukan pencatatan dalam buku inventaris aset, memberikan kode atau label pada aset, serta menyimpan dan memelihara aset sesuai ketentuan.

		Pemanfaatan aset	Bagaimana pengawasan terhadap pemanfaatan aset desa?	Kami memanfaatkan aset desa sesuai dengan peruntukkan dan ketentuan yang berlaku. Saat melakukan pemeriksaan Inspektorat memeriksa dokumen dan kondisi aset, tidak disalahgunakan dan memberikan manfaat bagi desa.
5	Upaya Peningkatan Pengawasan	Pembinaan	Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan kepada pemerintah desa?	Inspektorat daerah memberikan pembinaan melalui sosialisasi, dan konsultasi terkait Penggunaan dana desa, laporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu Inspektorat juga memberikan arahan atas semua temuan pemeriksaan agar pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan.

Subjek Penelitian : Kepala Desa Jawi

Jawi, Juli 2026

Kepala Desa



Yendra Haidi

Nama : Bambang Kusdianto

Jabatan : Kadus keuangan Desa Jawi

No	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Perencanaan	Pengawasan penyusunan APBDes	Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penyusunan APBDes sebelum ditetapkan?	Sebelum APBDes ditetapkan, DPMD melakukan pengawasan melalui proses evaluasi terhadap rancangan APBDes yang disusun oleh desa. DPMD memeriksa kesesuaian antara APBDes dengan RKPDs, Peraturan Perundang-undangan, pagu anggaran
2	Pelaksanaan	Kesesuaian pelaksanaan dengan APBDes	Bagaimana memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan APBDes?	Memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan, baik dari kegiatan, lokasi dan besaran anggaran. Inspektorat melakukan pengawasan dengan audit atau money check untuk memastikan kegiatan sesuai dengan APBDes.
3	Penatausahaan	Pencatatan transaksi	Bagaimana pengawasan terhadap pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa?	Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap Buku, Buku bank, rekap pajak, serta dokumen SPJ dengan RAB yang ada di APBDes.
		Pemeriksaan administrasi	Bagaimana pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pajak dilakukan?	Buku, Buku Bank dan rekapitulasi pajak dicocokkan dengan bukti pendukung seperti kuitansi, nota, rekening koran, bukti setor pajak. Inspektorat memeriksa kesesuaian antara saldo rekening bank serta memastikan pemotongan, penyetoran dan pelaporan telah dilakukan sesuai ketentuan.



		Penggunaan Siskeudes	Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes?	inspektoret hanya melihat dan memastikan kaur keuangan bisa mengoperasikan aplikasi siskeudes. inspektoret lain fokus melakukan pemeriksaan pada SPJ, aset dan fisik dari kegiatan yang ada.
		Ketepatan pencatatan	Bagaimana memastikan seluruh transaksi dicatat secara lengkap dan benar?	inspektoret mengawasi dan memeriksa ketrampilan antara bukti transaksi, pembukuan / SPJ & sandisk yang dengan RAB yang ada di APBDes. jika ditemukan kesalahan, inspektoret memberikan rekomendasi perbaikan.
		Kendala administrasi	Kesalahan administrasi apa yang paling sering ditemukan?	ketidaktengkapan dokumen pendukung pada laporan pertanggungjawaban / SPJ, kesalahan dalam perhitungan pajak dan ketidaklengkapan apa yang diidentifikasikan dengan RAB.
4	Pengelolaan Aset Desa	Pemanfaatan aset	Bagaimana pengawasan terhadap pemanfaatan aset desa?	melakukan pemeriksaan administrasi dan pengecekan langsung terhadap penggunaan aset, dan memastikan aset dimanfaatkan sesuai peruntukannya, tercatat dalam buku inventaris desa.
5	Upaya Peningkatan Pengawasan	Pendampingan	Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan kepada pemerintah desa?	melalui pembinaan, konsultasi serta pemberian arahan terkait pengelolaan keuangan desa. inspektoret juga membantu menjelaskan sesuai ketentuan berlaku dan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi desa.

		Penerapan SPIP	Bagaimana penerapan SPIP dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa?	inspektoret memastikan setiap tahapan sudah sesuai dengan ketentuan untuk meminimalkan kesalahan, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan akuntabilitas keuangan desa.
		Pencegahan penyimpangan	Strategi apa yang dilakukan untuk mencegah penyimpangan pengelolaan Dana Desa?	yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan melalui pembinaan dan monitoring secara berkala, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan inspektoret untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Subjek Penelitian: Kaur Keuangan Desa Jawi

Jawi, Juli 2026

Kaur Keuangan



Bambang Kusdianto

Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Talang Padang

Nama : Edi Ismanto
Kepala Desa : Talang Padang

No	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Perencanaan	Pengawasan penyusunan RKP Desa	Bagaimana peran Inspektorat dalam mengawasi penyusunan RKP Desa?	Inspektorat Daerah membantu program RKP Kabupaten bagi pemerintah Desa dan BPD terkait dengan penyusunan RKP Des dan APBDes.
		Pembinaan pada tahap perencanaan	Apakah terdapat pembinaan atau asistensi kepada pemerintah desa sebelum APBDes ditetapkan?	Inspektorat juga membantu pelayanan bagi pemerintah desa yang menerima Asistensi dan bantu RKP Des / APBDes.
		Pencegahan penyimpangan	Bagaimana upaya Inspektorat mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan?	
2	Pelaksanaan	Monitoring kegiatan	Bagaimana monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa?	Setara Kepala Monitoring dibantu oleh photo Dinas PAD dan Kecamatan. Pengawasan akan dilakukan oleh BPD dan Inspektorat Daerah melakukan Monitoring Abjad di Kali dalam Tahun Anggaran Kepala Desa dan pemerintah Kecamatan akan melakukan Abjad dan BPD dan Inspektorat.
		Kesesuaian pelaksanaan dengan APBDes	Bagaimana memastikan pelaksanaan	



			kegiatan sesuai dengan APBDes?	
3	Pertanggungjawaban	Tindak lanjut rekomendasi	Bagaimana pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan?	Pemantauan terakhir oleh tim inspeksi dilakukan dengan rutin.
		Akuntabilitas	Bagaimana pengawasan Inspektorat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?	Inspektorat melakukan pemeriksaan melalui formulir dan Saran-saran yg diberikan oleh Desa Pemerintah Desa.
4	Pengelolaan Aset Desa	Inventarisasi aset	Bagaimana pengawasan terhadap inventarisasi aset desa dilakukan?	Dalam pelaksanaan pengawasan (Audit, Nona) Inspektorat melakukan pembinaan terkait dg pengelolaan dan Pencatatan Aset Desa.
		Pengamanan aset	Bagaimana memastikan aset desa telah diamankan dengan baik?	dan memastikan pengamanan Aset telah dg Saran-saran yg telah di Penerimaan.

		Pemanfaatan aset	Bagaimana pengawasan terhadap pemanfaatan aset desa?	Ast desa dimanfaatkan sesuai pemenuhannya.
5	Upaya Peningkatan Pengawasan	Pembinaan	Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan kepada pemerintah desa?	pembinaan langsung melalui kegiatan Pembinaan (Audit, Nona), dan Aritansi. Pembinaan tidak langsung melalui kegiatan Konsultasi, dan

Subjek Penelitian : Kepala Desa

Talang Padang, Juli 2026



Nama : Riki Efrigani
 Jabatan : Kaur Keuangan
 Desa : Talang Padang

No	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Perencanaan	Pengawasan penyusunan APBDes	Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penyusunan APBDes sebelum ditetapkan?	Sebelum APBDes ditetapkan, dilakukan evaluasi terhadap rancangan APBDes dan menyesuaikan dengan RKPD sesuai aturan yang berlaku. Pada perencanaan kita koordinasi dan konsultasi dengan DPMd dan dilampirkan oleh TPD, juga konsultasi di Muspades.
2	Pelaksanaan	Kesesuaian pelaksanaan dengan APBDes	Bagaimana memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan APBDes?	Melaksanakan setiap kegiatan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Setiap pencairan anggaran didukung dengan dokumen pertanggung jawaban yang lengkap.
3	Penatausahaan	Pencatatan transaksi	Bagaimana pengawasan terhadap pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa?	Pada setiap akhir bulan melakukan pencocokkan antara Bku, buku Bank, dan seluruh transaksi sebelum di lakukan pemeriksaan oleh Inspektur. Ini sangat membantu kami meminimalisir kesalahan pencatatan dan audit.
		Pemeriksaan administrasi	Bagaimana pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pajak dilakukan?	Bku, Buku Bank dan rekapitulasi pajak di serahkan dengan bukti dukung, memeriksa kesesuaian antara saldo rekening bank serta memastikan penyetoran atau pengalihan dan pelaporan telah dilakukan sesuai ketentuan.

		Penggunaan Siskeudes	Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes?	Melakukan pengecekan SPJ, aset dan laporan fisik BUM dengan APBDes, memeriksa keabsahan penggunaannya.
		Ketepatan pencatatan	Bagaimana memastikan seluruh transaksi dicatat secara lengkap dan benar?	Melakukan pemeriksaan kembali terhadap seluruh kelengkapan dokumen. Penyusunan laporan pertanggung jawaban secara kami lakukan berdasarkan seluruh bukti transaksi yang telah dikumpulkan selama pelaksanaan kegiatan.
		Kendala administrasi	Kesalahan administrasi apa yang paling sering ditemukan?	Ketertarikan dalam mengumpulkan dokumen untuk kelengkapan SPJ.
4	Pengelolaan Aset Desa	Pemanfaatan aset	Bagaimana pengawasan terhadap pemanfaatan aset desa?	Melakukan pemeriksaan administrasi mutasi, pengecekan langsung terhadap aset yang ada di desa.
5	Upaya Peningkatan Pengawasan	Pendampingan	Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan kepada pemerintah desa?	Adanya audit, monitoring, pembinaan, konsultasi, sosialisasi yang dilakukan oleh Inspektur daerah.

	Penerapan SPIP	Bagaimana penerapan SPIP dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa?	Mr. Fektard memberikan pemahaman tentang regulasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dengan melakukan pendampingan, koordinasi dengan desa.	2
	Pencegahan penyimpangan	Strategi apa yang dilakukan untuk mencegah penyimpangan pengelolaan Dana Desa?	Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Inspektur, pemeriksaan secara berkala, mematuhi regulasi atau prosedur yang berlaku serta menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh inspektur daerah.	2

Subjek Penelitian: Kaur Keuangan

Talang Padang, Juli 2026



Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Gunung Megang

1. Pelancaran :

1. Melakukan Pendampingan dan Pembinaan dg cara
 - Sosialisasi aturan Baru ke pemdes
 - Bimtek ttg tata cara yang benar Pengurusan RKP Desa yg benar dg tujuan mencegah kesalahan sejak awal bukan hingga ada temuan.
2. Melakukan Reriv dg melakukan pengecekan terhadap 5 hal:
 1. Kesesuaian : RKP Desa, RPKM Desa dan Prioritas DD/ADD
 2. Kelengkapan : lampiran RAB, RFPDes, DPA dan Dok lainnya.
 3. Fungsional : Harga Satuan sesuai EBU Feb / tidak wor-up
 4. Kepatuhan : tidak ada kelainan yg dilarang seperti gaji operasional sesuai aturan.
 5. Akuntabilitas : Kode Fet sesuai dg Permendagri 28/2018.
3. Dengan melakukan Reriv RKP Desa dan melakukan pengecekan Kesesuaian RPKM Des, tidak fiktif dan sesuai Prioritas DD.

2. Pelaksanaan :

1. Pelaksanaan audit 1 Unit dilaksanakan Menguji
 - I uji Kepatuhan / Administrasi Potensi
 - Perencanaan
 - Pengalokasian
 - Pencapaian
 - Pertanggungjawaban
 - 2. uji Fisik / Lapangan
 - Volume
 - Kualitas → mutu sesuai RAB
 - Keberadaan bangunan
 - 3. uji Substansi / Wawancara kepada pemangku Desa yg terkait.
2. Monitoring dilakukan dg memperhatikan indikator :
 - Waktu / Penyaluran Dana tahap 1,2 tepat waktu
 - Serapan / Persentase Serapan anggaran
 - Fisik / Volume dan mutu sesuai RAB
 - Kepatuhan / TPK Reg, Pajab dan SPT
 - Transparansi / Paparan Informasi dan Laporan ke RPD.

3. ^{Pemantauan} tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan dg 5 tahapan :

1. ~~Pencatatan~~ dan Klarifikasi temuan
2. ~~Pemberitahuan~~ ke Desa
3. ~~Penerimaan~~ laporan TL dari Desa
4. Verifikasi laporan TL
5. ~~Penetapan~~ status TL dan pelaporan .

4. Pengawasan Inspektorat untuk meningkatkan ~~kontabilitas~~ ^{akuntabilitas} Pengelola Keuangan Desa dg 5 tahap :

1. Pengawasan Preventif / Pencegahan
2. Pengawasan ~~ulterior~~ / Real Time
3. Pengawasan Reaktif / Evaluasi dan Audit
4. Pengawasan ~~ulterior~~ melalui Rekomendasi dan tindak lanjut
5. Pengawasan Kolaboratif .

④ Aset : tindak inspektorat apabila ditemukan ~~Pengelola~~ ^{Pengelola} Aset Desa :

1. Konfirmasi dan Klarifikasi dalam pemeriksaan
2. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam LHP dan Rekomendasi
3. ~~Pemantauan~~ ^{Pemantauan} tindak lanjut
4. tindak lanjut sesuai Rekomendasi jika tidak ditindaklanjuti

⑤ Bentuk ~~Pertemuan~~ yg diberikan kepada Pemerintah Desa yaitu :

1. Bimtek
2. Pendampingan / Asistensi
3. ~~Review~~ / Evaluasi Diri
4. Sosialisasi / Diseminasi Aturan Baru
5. Klinik Konsultasi
6. Pembinaan Hasil Pengawasan
7. Pemberian Penghargaan dan Control

Bentuk Pendampingan :

1. Pendampingan Penyusunan Dokumen Keuangan
2. Pendampingan Pemetaan Aset Desa
3. Pendampingan Pengadaan Barang/jasa
4. Pendampingan tindak lanjut temuan .

- Koordinasi antar Inspekturat, DPMD dan KEC. dilaksana ty Rapat:
- Koordinasi Perencanaan Pengawasan terpadu ty topusi dan jumlah masing @ masing.
 - Koordinasi Pelaksanaan Di lapangan
 - Koordinasi Pertukaran Data dan Informasi
 - Koordinasi Pengawasan temuan dan tindak lanjut.

Pencegahan Penghapusan dilakukan ty:

- Pengkaderan SDN Desa
- Transparansi Pengelola Keuangan Desa
- Pengawasan kerlapis dari pihak BPD, KEC, DPMD dan APIP Inspekturat.
- Efektifitas dan Efisi jera bagi Desa yg telah menyampaikan laporan.
- Pengkaderan Bubyk dan Komitmen melalui Paktet Integritas Kepala Desa.

Cuunng Megang,

Juli 2026

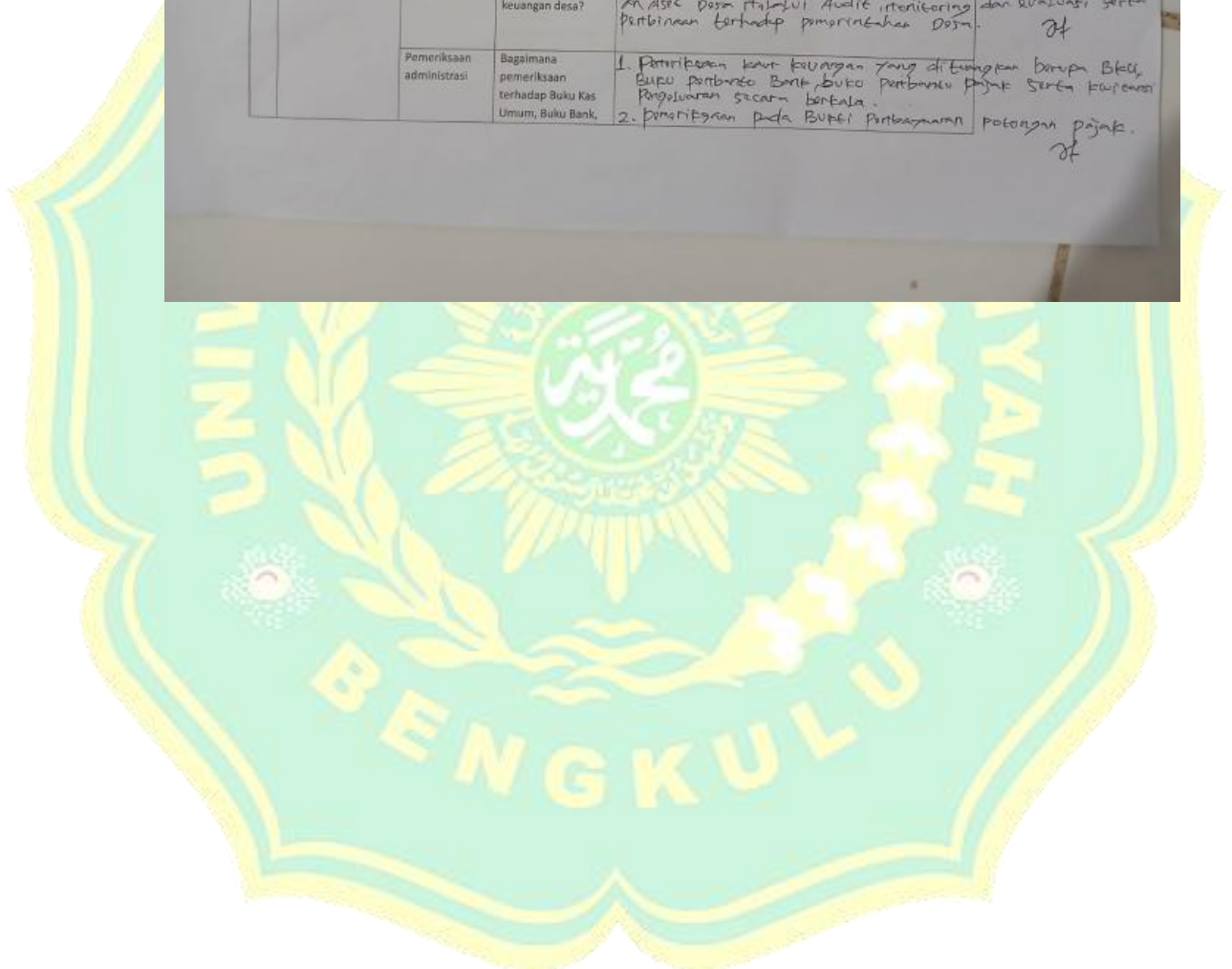
Kepala Desa



Mersiawan

Nama : Andriani Veronika
 Jabatan : Kaur Keuangan
 Desa : Gunung Megang

No	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Perencanaan	Pengawasan penyusunan APBDes	Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penyusunan APBDes sebelum ditetapkan?	Adanya pendampingan dan pertanggungjawaban dari TAPD (Pembantu Desa dan Dinas PMD) yang berupa Sosialisasi tentang Prioritas Penggunaan DD dan ADD yang tertuang dalam Perkada dan Perbup tahun Anggaran 2026. JH
2	Pelaksanaan	Kesesuaian pelaksanaan dengan APBDes	Bagaimana memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan APBDes?	Desa melaksanakan Musyawarah Desa tahun berjalan, yang mana Hasil dari di tawarkan ke dalam APBDes yang di Sepeleksi bersama BPD Desa. Selanjutnya Pemerintah Desa membuat RAB yang di input ke Sistematis. JH
3	Penatausahaan	Pencatatan transaksi	Bagaimana pengawasan terhadap pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa?	1. Pengawasan berupa itenering dari Dinas PMD. 2. Pengawasan dari Inspektorat berupa Pelaksanaan, Pemertanahan, Pertanggungjawaban dan Pengeluaran ASAC Desa melalui Audit, itenering dan evaluasi serta pertanggungjawaban terhadap pemerintah Desa. JH
		Pemeriksaan administrasi	Bagaimana pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, Buku Bank,	1. Pemeriksaan kaur keuangan yang di tawarkan berupa Buku, Buku Pertanggungjawaban, Buku Pertanggungjawaban Pajak Serta kaur keuangan 2. Pemeriksaan pada Buku Pertanggungjawaban Potongan pajak. JH



DOKUMENTASI



IRBAN



AUDITOR



PPUPD

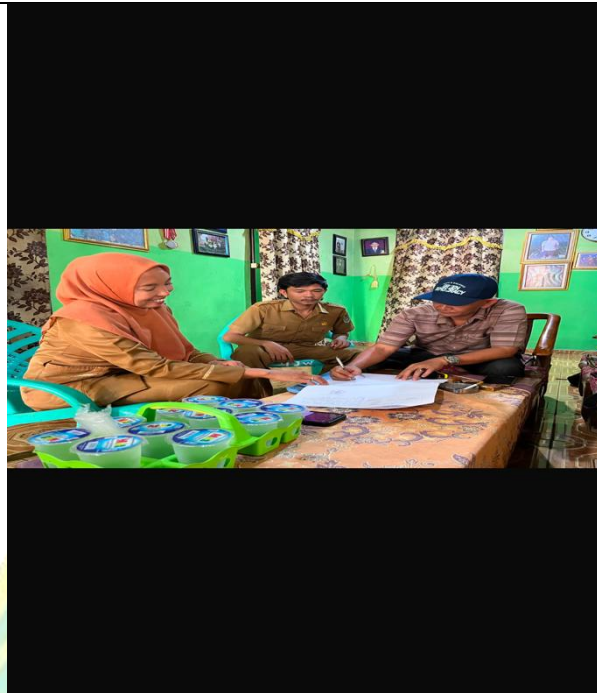


Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Talang Padang.





Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Gunung Megang



Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Jawi

